

## IJTIHAD POLITIK ISLAM PALEMBANG DI MASA ORDE BARU

**Dalilan, Kiki Mikail**

Prodi Politik Islam UIN Raden Fatah Palembang

Email : kikimikail@radenfatah.ac.id

### **Abstract**

*This research aims at exploring the dynamics of Islamic politics during Suharto's New Order Regime, particularly when the regime simplifies political parties into merely three parties. This political shift, then, caused Muslim figures in Palembang, who were initially involved in Islamic political parties, to move their political vehicles and began to take a role in the management of Golkar party in one side, and remained consistent with the struggle of Islamic political parties in another side. This involvement was a middle ground for bridging the political interests of Muslims in Palembang and in the same time following the political flow of the central government.*

### **Keywords:**

*Political Move, New Order Regime, Islamic Political Party, Palembang*

### **PENDAHULUAN**

Islam pada hakekatnya mengakui keterpaduan antara agama dan politik meski secara konseptual baik Islam sebagai agama dan politik dapat dibedakan. Berpolitiknya umat Islam karena Islam hadir bukanlah semata agama namun juga mengandung dasar-dasar dari sebuah sistem politik. Gugusan sejarah dan pemikiran Islam dibangun diatas fundamen agama dan politik yang saling bergandengan dengan selaras. Sepanjang sejarah peradaban Islam dapat kita lihat betapa besarnya keterlibatan umat Islam dalam politik dan pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, keterlibatan umat Islam dalam politik adalah suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, baik dilihat dari sejarah maupun pada perkembangan kontemporer sekarang.

Terlibatnya umat Islam dalam politik dilihat oleh Taufik Abdullah, dalam bukunya *Islam dan Masyarakat*, didasarkan oleh tiga asumsi dasar yang saling berkaitan yang membentuk wajah politik Islam. *Pertama*, Islam adalah suatu konsep keutuhan yang tidak memisahkan negara dan masyarakat sebagai kenyataan yang konkrit. *Kedua*, pengalaman dan peranan historis Islam dalam proses pembentukan negara dalam sejarah peradaban Islam, dengan corak politik dan kekuasaan yang

berubah dinamis setiap zamannya. *Ketiga*, kenyataan kuantitatif bahwa mayoritas rakyat Indonesia ialah pemeluk agama Islam.<sup>1</sup>

Sepanjang sejarah Indonesia, baik selama masa kolonial maupun setelah kemerdekaan, umat Islam memperlihatkan peranannya di bidang politik. Di masa kolonial, umat Islam tampil sebagai yang terdepan menentang kolonialisme. Di sana perlawanan muncul tidak hanya dilatarbelakangi oleh konflik ekonomi dan politik, tetapi juga hadirnya Islam sebagai landasan ideologi melawan penjajahan bangsa asing. Begitupun ketika perjuangan politik modern telah hadir, tokoh-tokoh Islam yang terdidik mampu mentransformasikan perjuangannya dalam bentuk yang lebih terorganisir.

Syamsuddin Haris merumuskan setidaknya ada empat upaya Orde Baru mencapai tujuan tersebut. *Pertama*, menciptakan pengelompokan politik yang baru di DPR. Hal itu akan mengatasi dominasi partai-partai dan dapat mempermudah persetujuan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, penguasa Orde Baru memperkuat organisasi Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), yang semula dibentuk atas inisiatif Angkatan Darat untuk menampung aspirasi golongan fungsional dan kekaryaannya. Sejak 1969 guna mengantisipasi pemilihan umum 1971, Soeharto menjadikan Golkar sebagai mesin politik, dengan wajah partisan angkatan bersenjata dan birokrasi sebagai basis kekuatan. *Kedua*, membangun suatu birokrasi yang bebas dari pengaruh partai politik sehingga program pembangunan yang dicanangkan pemerintah dapat terlaksana dengan baik. Dalam upaya mewujudkan cita-cita itu, lalu pemerintah menciptakan jarak antara partai dan birokrasi. Selain itu, juga membiarkan kerja sama yang erat antara birokrasi dan Golkar. *Ketiga*, mendorong pembentukan kelompok kepentingan yang korporatis yang bertujuan ganda. Upaya ini untuk mengeliminasi konflik-konflik sosial yang muncul dari perbedaan kepentingan. Akan tetapi, tidak dimaksudkan untuk mengambil peran artikulatif dari partai-partai politik. *Keempat*, menyederhanakan jumlah partai dan ideologi yang dianut sehingga konflik dan ketidakstabilan diharapkan akan berkurang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Taufik Abdullah. *Islam dan Masyarakat : Pantulan Sejarah Indonesia* (Jakarta : LP3ES, 1987), h. 37.

<sup>2</sup>Syamsuddin Haris. *PPP dan Politik Orde Baru* (Jakarta : LP3ES, 1991), h. 35.

Dalam literatur-literatur mengenai politik Islam di Indonesia, pembahasan mengenai proses depolitisasi dan pengontrolan politik Islam sebagian besar berada dalam konteks nasional. Dari pembahasan konteks nasional mengenai kebijakan Orde Baru terhadap politik dapat diketahui bagaimana kebijakan Orde Baru terhadap politik Islam yang pada umumnya berkaitan dengan kebijakan Pusat. Nampaknya akan ada kemajemukan jika dapat dilihat dari konteks yang lebih melokal. Begitupun dengan relasi antara Islam dan politik di Indonesia lebih banyak dibahas secara umum. Meskipun nantinya akan menggunakan teori politik Islam dan konsep relasi Islam dan negara sebagai titik awal menjelaskan ijihad umat Islam Palembang dalam menghadapi perubahan politik. Penekanan penelitian ini ialah mengenai proses perubahan politik dan reaksi politik umat Islam terhadap perubahan itu dalam ranah yang lebih lokal, yakni politik Islam di Palembang.

Teori dekonfessionalisasi Nieuwenhuize, teori domestikasi benda dan dikotomi santri abangan Jay dan Geertz merupakan konsekuensi-konsekuensi yang sepenuhnya timbul dari kecenderungan untuk memandang Islam sebagai agama yang secara organik terkait dengan politik. Asumsi paling pokok mereka adalah mengantarkan mereka untuk melihat realitas realitas politik Islam di Indonesia dalam kerangka yang statis dan dikotomis, tidak dinamis dan evolutif.

Peta politik Islam di Indonesia dewasa ini benar benar berbeda dibandingkan dengan era penjajahan atau bahkan pada masa presiden RI pertama Soekarno. Sementara mungkin benar bahwa sisa-sisa tertentu dari ciri-ciri politik periode yang lebih awal sebelum pudar, tetapi tampaknya hampir dapat dipastikan bahwa basis utama para aktor dan pengikutnya secara sosial, kultural, ekonomi dan politik sudah benar benar berbeda. Perbedaan corak basis pendukung Islam kontemporer di Indonesia menjadi salah satu penyebab utama tampilnya pandangan baru di mana politik Islam tidak lagi harus dipandang dalam polanya yang formalistik/legalistik dan skriptualistik.

Beberapa aktor politik tersebut kini memulai memandang politik sebagai persoalan duniawi dan sekuler. Politik tidak harus beroperasi diatas landasan patokan patokan agama dalam bentuknya yang kaku, melainkan berlandaskan ukuran ukuran

moral dan etis seperti keadilan, kesamaan, dan kebebasan, yang benar benar mendasar dilihat dari ajaran ajaran Islam.<sup>3</sup>

Selain masalah masalah kompleks relasi Islam politik, identifikasi Islam politik dengan partai partai politik Islam seperti Masyumi dan NU pada Pemilu pertama tahun 1955 juga pada akhirnya akan menyebabkan munculnya landasan landasan teoritis baru mengenai relasi masyarakat Islam, partai politik Islam dna kehendak dari konstituen politik Islam. Afiliasi keagamaan adalah salah satu contoh dan faktor yang amat menentukan. Tetapi karena sudah benar benar terpolitisasikan, sebagai konsekuensi dari pengidentifikasian Islam politik dengan partai partai politik Islam, maka afiliasi politik berfungsi sebagai satu-satunya kriteria untuk menentukan apakah seseorang tersebut masuk ke dalam umat Islam atau tidak.

Dengan berkuasanya pemerintah Orde Baru menyusul gagalnya kudeta PKI pada 1965, banyak pemimpin politik Islam yang menaruh harapan besar. Harapan tersebut nampak jelas terutama dikalangan bekas pemimpin Masyumi dan pengikut-pengikutnya yang selama periode demokrasi dipimpin merasa benar benar termarjinalkan. Karena merasa menjadi bagian penting dari kekuatan koalisi yang telah berhasil menghancurkan PKI dan menjatuhkan pemerintahan Orde Lama, mereka membayangkan terjadinya penguatan politik Islam di panggung politik nasional.

Langkah presiden Soeharto dengan membebaskan bekas tokoh tokoh Masyumi yang dipenjara oleh Soekarno seperti Muhammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, Mohammad Roem, Kasman Singodimedjo, Prawoto Mangkusasmito, dan Hamka makin memperbesar harapan mereka bahwa rehabilitasi Masyumi akan berlangsung tidak lama lagi. Untuk itu, sebuah panitia yang diberi nama dengan nama Badan Koordinasi Amal Muslimin didirikan untuk merealisasikan harapan dan keinginan tersebut.<sup>4</sup>

Ada beberapa hal yang mesti ditinjau kembali dalam pembahasan politik Islam pada masa Orde Baru tersebut. *Pertama*, depolitisasi politik Islam secara nasional dalam penerapannya tidak dapat disamakan antara satu daerah dengan daerah lainnya karena latar belakang sejarah, ekonomi, politik, dan kultural di setiap daerah berbeda satu sama lainnya. *Kedua*, berkaitan dengan resistensi terhadap depolitisasi di mana basis politik

---

<sup>3</sup>Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta, Paramadina 1998), h. 51

<sup>4</sup>B.J. Boland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia* (The Hague:Nijhoff,1982), h. 135-149

Islam yang kuat seperti di Sumatera menjadikan implementasi kebijakan Orde Baru diperlakukan berbeda. Jika dalam penyingkiran politik Islam dari pemerintahan dilakukan terhadap para elit tokoh-tokoh Islam, maka penerapan depolitisasi Islam terhadap masyarakat memunculkan efek yang represif.

Mengenai akan berwarnanya pembacaan politik Islam dalam konteks lokal, Taufik Abdullah, mengemukakan bahwa intensitas relasi Islam dan negara memperlihatkan pola ketidaksamaan dalam bentuk dan tingkat inkorporasi Islam dalam jaringan sosial dan tradisi politik yang dialami setiap daerah. Perbedaan ini lazim dikemukakan sebagai retak kultural atau *cleavages*. Hal ini antara lain disebabkan oleh perbedaan dan corak perbenturan kultural yang terjadi di awal Islamisasi dan corak pusat kekuasaan politik yang dihasilkan oleh proses ini. Dalam perkembangan selanjutnya terjadilah perbedaan dalam jangkauan serta tekanan pengaruh ajaran moral dan hukum Islam dalam kehidupan sosial. Oleh sebab itu, terdapat daerah yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, seperti Aceh, Minangkabau, dan Banten, yang begitu memperlihatkan tradisi yang bersifat integratif terhadap Islam bahkan menjadi dasar dari sistem nilai yang dominan. Sementara itu ada juga daerah yang mayoritas masyarakatnya beragam Islam seperti kebanyakan daerah di Jawa cenderung memperlihatkan tradisi dialog, antara entitas agama dan kultural maupun dengan entitas politik yang lebih sekuler, dalam pengertian sosiologis maupun dari sudut ideologis<sup>5</sup>.

Mengapa kemudian politik Islam di Palembang diajukan sebagai fokus penelitian ini. *Pertama*, latar belakang kultural Palembang sebagai bagian dari dunia Melayu Islam. Sebagaimana yang dibahas sebelumnya mengenai adanya perbedaan tingkat inkorporasi Islam, maka dari penelitian ini hendak dilihat bagaimana politik Islam berbasis kultur Melayu Islam menghadapi perubahan politik, baik secara konseptual maupun praksis. *Kedua*, kuatnya kultur Melayu Islam di Palembang menjadi struktur penopang tumbuhnya politik Islam yang telah terbukti dengan begitu dominannya politik Islam sebagai artikulasi kepentingan umat Islam di Palembang selama periode Orde Lama. *Ketiga*, kontestasi politik dan keagamaan yang terjadi di Palembang antara *kaum tuo* dan *kaum mudo* yang saat Orde Lama relatif mereda, bahkan cenderung bersatu melawan kebijakan dari Pusat terkait sentralisasi politik dan

---

<sup>5</sup>Taufik Abdullah. *Islam dan Masyarakat : Pantulan Sejarah Indonesia* (Jakarta : LP3ES, 1987), h. 35.

ekonomi. Dengan munculnya Orde Baru dan perubahan tatanan politik yang terkait kebijakan pusat terhadap politik Islam, maka akan menarik untuk dikaji bagaimana kedua belah kelompok terkondisikan dengan perubahan. *Keempat*, sumber daya ekonomi Palembang sebagai pusat perekonomian di Sumatera cukup menentukan bagaimana Pemerintah Pusat bertindak terhadap Palembang. Terutama sebagai salah satu daerah penghasil minyak terbesar di Indonesia melalui pengelolaan Pertamina di mana rezim Orde Baru menyandarkan penghasilan dan pembiayaan pembangunan dari ekspor minyak. Hasil bumi Palembang yang melimpah ruah, tidak diimbangi dengan pembangunan Palembang yang masih lambat dan terkesan kekayaan Palembang hanya berhenti di pemerintah pusat. Oleh karena itu, menarik untuk dibahas juga mengenai relasi pengaruh struktur ekonomi-politik Indonesia saat Orde Baru terhadap politik Islam di Palembang.

### **Masuk dan Berkembangnya Islam di Palembang**

Dalam memahami masuknya Islam ke Daerah Palembang menurut Taufik Abdullah dan Noorduyn melalui tiga fase; fase pertama adalah *de komst* (datang) yang sangat dipengaruhi faktor ekonomi karena Palembang sendiri merupakan salah satu daerah maritim yang dilalui oleh masyarakat internasional melalui wilayah perairan. Fase yang kedua adalah *receptie* atau penerimaan yang didorong oleh faktor agama. Sedangkan yang ketiga adalah *uitbreiding* atau pengembangan yang didorong oleh faktor politik.<sup>6</sup>

Ditinjau dari sudut geografisnya, dari Jambi dan Lampung dihubungkan oleh daerah rawa yang luas, dari Bengkulu oleh Bukit Barisan. Sungai-sungai di alamnya yang semuanya dapat dilayari bertemu pada suatu titik yaitu ibukota Palembang. Hal ini menjadikan Palembang mempunyai persyaratan untuk mendirikan pusat kekuasaan yang kuat. Letak dari muara-muara sungai yang lebar terhadap jalan-jalan dagang yang besar, telah memikat dan memanggil terutama para pedagang asing untuk menetap di Palembang.

Penduduk Palembang dibedakan atas dua golongan besar yaitu golongan bangsawan atau priyayi dan rakyat. Priyayi adalah keturunan raja-raja dimana status ini

---

<sup>6</sup> J. Noorduyn, *Islamisasi Makassar*, (Bhratara : Jakarta,1972), hal. 10

diperoleh karena faktor kelahiran ataupun atas restu sultan. Di antara priyayi ada yang tidak memiliki dusun atau daerah kekuasaan dan mereka hidup dari kerajinan tangan dan kesibukan-kesibukan seperti membuat barang-barang kerajinan, berdagang dan bertani.<sup>7</sup>

Para priyayi yang mempunyai dusun-dusun atau marga diwajibkan untuk membantu Sultan jika ada perang, bantuan itu bisa berupa tenaga maupun harta. Tergolong juga dalam penduduk Palembang ialah juga orang-orang asing seperti Cina, Arab dan lainnya. Orang-orang Cina kebanyakan bertempat tinggal di rakit, sementara orang-orang Arab mempunyai kampung sendiri serta orang-orang asing bertempat tinggal di antara rakyat setempat.<sup>8</sup>

Perdagangan diadakan dengan daerah-daerah luar Palembang, seperti Jawa, Bangka, Cina dan lain sebagainya. Penduduk Palembang menjual berbagai hasil bumi sedangkan para pedagang dari luar Palembang kebanyakan menjual barang jadi seperti pedagang dari Cina yang menjual sutera, guci, obat-obatan, dan teh. Mereka biasa bertransaksi diatas perahu, orang-orang Palembang membeli dari orang-orang Arab dan Cina kemudian membawa ke pedalaman untuk dijual kembali disana. Orang-orang Palembang biasa membeli barang dengan kredit dan membayar dengan barang pula. Kebudayaan meliputi selain hukum adat ada kesenian, kerajinan dan kesusasteraan.<sup>9</sup>

Orang-orang Palembang dikenal juga sebagai ahli bangunan dan ukir-mengukir, hal ini bisa dilihat dari adanya rumah-rumah besar yang pada umumnya dihiasi dengan motif bunga dan daun-daunan yang dipahat dalam kayu, selain itu mereka pandai mengerjakan kerajinan dari bahan gading, perak dan emas terutama dalam membuat ukiran-ukiran timbul.

Menurut D.G.E. Hall, Seri Teri Buana menjadi raja Palembang pada tahun 575 H atau bertepatan dengan 1179 M. Pada saat itu, Palembang yang menjadi pusat kerajaan Sriwijaya sedang mengalami kemerosotan dan malahan menurut beberapa

---

<sup>7</sup>H.A. Dahlan, *Risalah Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II*, (Palembang: TP, 1981), hal. 11

<sup>8</sup>Dedi Irwanto Muhammad Santun, *Venesia dari Timur: Memaknai Produksi dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang dari Kolonial sampai Pascakolonial* (Yogyakarta: Ombak, 2011), hal.31

<sup>9</sup>H.A. Dahlan, *Risalah Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II*, (Palembang: TP, 1981), hal. 14

penulis kemungkinan di tahun tersebut kerajaan Sriwijaya sedang mengalami keruntuhan.<sup>10</sup>

Pusat kota Palembang secara historis awalnya terletak di tanah tinggi. Berdasarkan jejak arkeologis dari proklamasi Sriwijaya, yang terdapat dalam bait bait prasasti Kedukan Bukit, jantung kota Palembang berada di Bukit Seguntang. Secara harfiah Bukit Siguntang mengandung artian tanah yang membuntang, guntang atau terapung.<sup>11</sup> Seiring dengan perjalanan waktu, terjadi pergeseran pusat kota Palembang, yang semula di Bukit Siguntang berpindah ke Keraton Kuto Gawang. Perpindahan pusat kota tersebut tidak lain disebabkan oleh runtuhnya Kerajaan Sriwijaya dan berdirinya kesultanan Palembang.

Setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit, Palembang menjadi daerah protektorat kerajaan Demak. Dengan demikian secara tidak langsung Palembang merupakan bagian dari kerajaan Islam. Inilah yang menjadi alasan Winstedt yang menyebut bahwa Islam masuk ke daerah Palembang pada abad ke 15.

Pendapat pendapat diatas menunjukkan bahwa walaupun telah ada orang Islam di Palembang pada abad ke 7 masehi, tapi baru diabad ke-16 mulai menampakkan keaktifannya dengan telah berdiri masjid atau langgar sebagai pusat kegiatan masyarakat Islam setempat. Hal itu sesuai dengan kebiasaan umat Islam mendirikan masjid atau langgar dimanapun dikota kota bila telah terbentuk masyarakat Islam.

Menurut Wellan berdasarkan berita Belanda dalam laporannya tahun 1663 bahwa di Palembang sedang di bangun masjid karena di masjid lama terbakar ketika ekspedisi Mayor Joan Van Der Laen yang menyerbu kota Palembang tahun 1659. Peristiwa penyerbuan itu adalah peperangan pertama antara Belanda dengan Palembang. Dari peristiwa tersebut dapat dikatakan bahwa di Palembang telah ada masjid yang mana masjid tersebut dibangun di kota di Keraton Kota Cawang (daerah sekitar kampung Palembang lama yang sekarang menjadi kompleks Pusri). Keraton ini

---

<sup>10</sup>D.G.E. Hall, *Sejarah Asia Tenggara*, (Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, 1987), h. 13

<sup>11</sup>Boedenani dan Djavid, *Tambo Kerajaan Sriwijaya sampai berakhirnya Kesultanan Palembang*, (Bandung: Penerbit Terate, 1956), h. 5

tempat menetap pertama rombongan Ki Gedeng Tua yang dalam sejarah disebut sebagai salah seorang membangun masjid pertama di Palembang.<sup>12</sup>

Proses peralihan kekuasaan di Palembang, baik peralihan dari perlindungan kerajaan Majapahit kepada Demak maupun Pajang ke Mataram dan juga pelepasan perlindungan Palembang dari Mataram berlangsung damai tanpa ada persetujuan dan tanpa upacara. Setelah Kesultanan Palembang berdiri sendiri dan kompeni berkuasa di Batavia, maka proses peralihan kekuasaan dari satu sultan kesultanan yang lainnya menimbulkan konflik internal keluarga yang bersaing ingin menduduki tahta. Hal ini merupakan salah satu strategi politik “pecah belah” Belanda dalam rangka untuk memasukkan pengaruhnya dalam Kesultanan Palembang tersebut. Putra Kesultanan yang berbeda ibu dijadikan alat konflik oleh Belanda sehingga persetujuan tersebut semakin tajam.<sup>13</sup>

Konflik tersebut dapat dilihat dari proses penggantian Sultan Muhammad Mansyur (1706-1714) dimana muncul kasus penunjukkan wali kerajaan Raden Uju yang kemudian menjadi Sultan Komaruddin. Selain itu, proses pergantian Sultan Komaruddin (1714-1724) antara pangeran Mangkubumi Muhammad Ali dengan adiknya Raden Lambu. Posisi Palembang sebagai suatu kerajaan maritim yang berada dalam catur perdagangan dengan berbagai negara dengan melibatkan Palembang dalam hubungan sekutu dan seteru dan juga dalam kaitan *overlord* dan *vasal* dengan berbagai kerajaan baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal dengan kerajaan kerajaan lain.<sup>14</sup>

Setelah dua abad menjadi bagian dari kerajaan kerajaan Islam di Jawa, pada tahun 1666 masehi Palembang resmi menjadi kesultanan yang berdiri sendiri ketika Raden Tumenggung mengumumkan dirinya menjadi Ratu Abdurrahman dan kemudian mengambil gelar Sultan Jamaluddin pada tahun 1681 M. Maka Islamisasi di Palembang gencar dilakukan dengan merubah struktur kekuasaan kesultanan Palembang yang kemudian disesuaikan dengan ajaran Islam.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>Ali Amin, *Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam, Masuk dan berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*, (Jakarta, UI Press 1986), h. 114

<sup>13</sup>Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam* (Jakarta:Logos,1998), h. 46

<sup>14</sup>Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam* (Jakarta:Logos,1998), h. 47

<sup>15</sup>Zulkifli, *Ulama Sumatera Selatan: Pemikiran dan Peranannya dalam Lintasan Sejarah*, (Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 1999), h. 2

### Ijtihad Politik Islam Palembang di Masa Orde Baru

Kekuatan politik Islam di Palembang setidaknya dapat dilihat dari dua kali pemilihan umum yang berlangsung selama Orde Lama. Masyumi, partai Islam yang dianggap sebagai kekuatan politik Islam yang membawa entitas partai Islam “luar Jawa” dipilih oleh mayoritas pemilih di Sumatera Selatan, dikuntit oleh kaum nasionalis melalui PNI, dan harus diakui pula bahwa PKI mampu bertengger di posisi ketiga. NU dan PSII sendiri yang notabene merupakan partai Islam mesti puas di posisi empat dan lima. Dari sini dapat dilihat bagaimana kekuatan politik di Sumatera Selatan dari spektrum ideologi dan aliran yang melatarbelakangi partai-partai politik yang bersaing memperebutkan suara di Palembang. Meskipun terpecah dalam berbagai partai politik, dapat disimpulkan bahwa partai-partai politik Islam mendominasi pilihan masyarakat di Sumatera Selatan.

**Hasil Pemilu 1955 untuk DPR di Sumatera Selatan<sup>16</sup>**

Peringkat	Kontestan	Jumlah Suara	%
1	Masyumi	628.386	43,1
2	PNI	213.766	14,7
3	PKI	176.900	12,1
4	PSII	149.239	10,2
5	NU	115.938	8,0
6	Perti	42.912	3,0
7	PSI	21.873	1,5
8	Tani Makmur	20.562	1,4
9	Partai Buruh	17.111	1,2
10	IPKI	13.560	0,9
	Kontestan Lain	56.865	3,9
	<b>Jumlah</b>	<b>1.457.112</b>	<b>100.</b>

Data perolehan suara yang kedua ialah pada hasil pemilu daerah 1957. Pada akhir 1957 diselenggarakan pemilu daerah secara bergiliran di berbagai daerah di Indonesia, kecuali Irian Barat yang saat itu masih dikuasai Belanda. Propinsi Sumatera Selatan mendapatkan giliran pada 1 Desember 1957. Hasilnya Masyumi masih

<sup>16</sup>Alfian. *Hasil Pemilihan Umum 1955 Untuk DPR* (Jakarta : Leknas, 1971), h. 23. Donald Hindley, *The Communist Party of Indonesia 1951-1963* (Berkeley : University of California Press, 1966) h. 223

memenangkan suara mayoritas di Sumatera Selatan, tetapi tanpa diduga PKI mampu meningkatkan perolehan suaranya sehingga naik ke posisi dua, dan mendapat kursi dewan yang lebih banyak. Kenaikan paling signifikan perolehan suara PKI di daerah luar Jawa berada di Propinsi Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Di Sumatera Selatan, Masyumi mendapat 553.276 suara, PKI berhasil melampaui PNI dengan 228.965 suara, PNI mendapat 187.042 suara, dan NU hanya berhasil mencapai 113.888.<sup>17</sup>

Palembang merupakan daerah yang selama Orde Lama merupakan salah satu basis Masyumi yang cukup kuat, namun mempunyai keistimewaan di mana penyesuaian politik dan pragmatismenya terhadap kebijakan pemerintah pusat pada era-era tuntutan otonomi menyeruak cukup dapat menyelamatkan Palembang dari konflik kekerasan. Pemerintahan Soekarno cukup kompromistis dan agak lunak terhadap Palembang, sehingga menjadi pertanyaan kemudian ialah bagaimana Orde Baru menindak usaha bangkitnya politik Islam di Palembang. Di daerah lain seperti Sumatera Barat, politik Islam diberangus cukup keras, di Palembang justru selama Demokrasi Terpimpin para tokoh umat Islam di Palembang masih mempunyai pengaruh baik terhadap pemerintahan daerah maupun masyarakat.

Kurun waktu awal Orde Baru digunakan sebagai periode penelitian dengan pertimbangan bahwa kondisi di Palembang setelah Orde Lama menghadirkan dinamika politik yang menarik untuk dicermati. Meskipun Partai Masyumi telah dibubarkan oleh rezim orde lama setelah terindikasi terlibat dalam gerakan PRRI, namun dukungan umat Islam Palembang tetap fokus pada partai politik Islam yang baru di bentuk sebagai wadah politik Islam yaitu Parmusi<sup>18</sup> dan NU. Meski tidak lepas dari pengaruh politik nasional, apa yang hadir pada dinamika politik lokal menghasilkan kekhasan alurnya sendiri yang mempengaruhi politik lokal pada periode selanjutnya bahkan sampai saat ini.

---

<sup>17</sup>Audrey R. Kahin dan George McT. Kahin. *Subversi Sebagai Politik Luar Negeri : Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia* (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1997), h. 344. Lihat juga Donald Hindley. *The Communist Party of Indonesia 1951-1963*. hal. 222. Di Pulau Jawa pada Pemilu 1955 PKI mendapatkan 21% dan naik menjadi 29% pada Pemilu Daerah 1957, Rex Mortimer. *Indonesian Communism Under Sukarno: Ideology and Politics, 1959-1965* (Jakarta;Singapore PT Equinox Publishing Indonesia,2006), h. 79.

<sup>18</sup>Organisasi-organisasi pendukung berdirinya Partai Muslimin Indonesia terdiri dari eks anggota istimewa Masyumi dan organisasi lain yang tidak mau menyalurkan aspirasi politiknya pada partai politik lain.

Jika pada periode 1950 sampai 1965 terjadi kontestasi politik antar kelompok politik dengan ideologi-ideologi yang berbeda, maka pada dekade pertama Orde Baru terjadi deideologisasi dan depolitisasi secara nasional, sehingga dalam lingkup penelitian lokal Palembang bertujuan mendapat gambaran situasi politik Palembang di masa transisi pemapanan Orde Baru. Palembang di masa transisi inilah yang nantinya dalam penelitian ini akan diulas dengan tujuan akan menemukan data-data baru sehingga semakin melengkapi kajian politik di Palembang.

**Daftar Hasil Pemilihan Umum 1971  
Daerah Pemilihan Sumatera Selatan<sup>19</sup>**

No	Daerah Tk.II	Partai Katolik	PSII	NU	Parmusi	Golkar	Parkindo	Murba	PNI	Perti	IPKI
1	Kodya Palembang	5446	15555	25105	4163	117344	2032	288	1650	475	687
2	Kodya Pangkalpinang	1438	517	3737	1514	10484	343	11	670	96	12
3	Ogan Komering Ulu	3198	17187	32106	23678	150729	1170	142	125	95	501
4	Ogan Komering Ilir	210	18061	23490	18456	124753	406	173	452	1517	300
5	Liot	407	7446	13538	12243	104291	89	114	3612	1510	1567
6	Lahat	86	6224	7719	1669	109366	439	171	156	79	435
7	Musi Rawas	68	4144	357	981	83224	302	46	531	47	69
8	Musi Banyuasin	300	16612	8570	32610	87075	435	158	5441	933	630
9	Bangka	1439	4482	10806	4806	59317	625	75	3225	87	36
10	Belitung	261	1031	3012	1394	39149	302	580	412	1	76
<b>Jumlah</b>		<b>4053</b>	<b>91889</b>	<b>53440</b>	<b>69544</b>	<b>85732</b>	<b>6648</b>	<b>1758</b>	<b>70274</b>	<b>10195</b>	<b>10913</b>

Adapaun secara nasional Pemilu 1971 yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1971 untuk memilih anggota DPR dengan hasil sebagai berikut :

Nama Partai	Suara	% suara	Kursi
Golkar	34.348.673	62,82	36
Nahdhatul Ulama	10.213.650	18,68	8

<sup>19</sup>Bintar R. Saragih. *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*. (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1988), hal. 230

Parmusi	2.930.746	5,36	4
Partai Nasional Indonesia	3.793.266	6,93	20
Partai Syarikat Islam Indonesia	1.308.237	2,39	10
Partai Kristen Indonesia	733,359	1,34	7
Partai Katolik	603,740	1,10	3
Pergerakan Tarbiyah Islam	381,309	0,69	2
Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia	338,403	0,61	
Murba	48,126	0,08	

Setidaknya perubahan politik di awal Orde Baru terlihat pada hasil pemilihan umum 1971 di Sumatera Selatan. Golkar tampil sebagai pemenang sejak saat itu, tetapi partai Islam seperti Parmusi, NU, PSII, dan Perti tetap memperoleh suara yang jika digabung masih memperlihatkan bentuk artikulasi politik umat secara signifikan ke dalam wadah partai Islam. Meski demikian sejarah membuktikan perubahan yang terjadi di masa transisi tersebut pada akhirnya tidak mengalami perubahan lagi selama beberapa dekade setelahnya. Angka-angka perolehan suara yang berada dalam data pemilu di atas bukanlah sekadar angka, dalam kajian sosial terutama politik terjadinya perubahan perilaku pemilih justru menimbulkan pertanyaan awal bagaimana dan kenapa terjadi perubahan. Hal tersebut yang nantinya akan dibedah melalui penelitian ini.

Penjelasan-penjelasan singkat di atas dihadirkan untuk merumuskan pentingnya penelitian ini dalam memahami dinamika politik Islam di Palembang. Selain itu ada alasan aktual yang juga mesti dilihat pada penelitian ini. *Pertama*, dilihat dari kajian ilmu politik di Indonesia, Palembang belum ditempatkan pada posisi sebagai sebuah tempat di mana politik hadir sebagai metode memahami bagaimana umat menyalurkan kepentingannya. *Kedua*, proses perubahan politik nasional acapkali hanya dilihat sebagai peralihan kekuasaan di Pusat, namun cukup jarang bagaimana implementasi dan prosesnya pada konteks lokal. *Ketiga*, meneliti faktor-faktor penyebab perubahan perilaku masyarakat di Palembang di masa transisi Orde Baru. *Keempat*, krisis politik yang acapkali mendera umat Islam seringkali tidak menjadi pembelajaran bagi umat. Oleh karena itu melalui penelitian ini diharapkan akan dapat menghadirkan evaluasi

kritis sekaligus sumbangsiah keilmuan bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan ke depannya.

Latar belakang munculnya Dewan Garuda di Sumatera Selatan dikarenakan adanya kekecewaan terhadap kinerja Gubernur Sumatera Selatan yang saat itu dipegang oleh R. Winarno Danuatmojo. Selama masa jabatannya, masyarakat menilai tidak ada satupun hasil dari kerja R. Winarno Danuatmojo yang mencolok atau berhasil.

Pembentukan Dewan Garuda di Sumatera Selatan berawal dari kongres adat yang diselenggarakan di Palembang dari 15 sampai dengan 17 Januari 1957 yang mengeluarkan Piagam Perjuangan Rakyat Sumatera Selatan.<sup>20</sup> Tujuan dikeluarkannya piagam tersebut adalah sebagai usulan untuk mengubah tatanan politik nasional dan menghentikan arah kebijakan pemerintah yang dianggap mengarah kepada hal yang membahayakan kepentingan dan pembangunan nasional. Pembentukan Dewan Garuda dipelopori oleh Kolonel (Purn) Nuh, Kapten (purn) Thalib dan Amin Husein. Namun, untuk kepentingan dewan Garuda, Dewan Garuda dipimpin oleh Letnan Kolonel Barlian dengan beranggotakan Mayor Nawawi, Mayor Alamsyah Ratu Perwiranegara, Mayor Asnawi Mangkualam dan Mayor Yusuf Singadadikane.

Pada awal perkembangannya, Dewan Garuda di Palembang menjalin kerjasama yang baik dengan daerah Sumatera yang lainnya. Hal ini terlihat ketika Palembang menjadi tempat pertemuan tokoh militer lainnya yang ada di Sumatera yang pada gilirannya pertemuan tersebut akhirnya menghasilkan piagam Palembang yang ditandatangani pada tanggal 8 September 1957<sup>21</sup> yang merupakan landasan perjuangan bersama dari daerah daerah yang bergolak pada saat itu.

Isi dari piagam Palembang tersebut adalah pelaksanaan pembangunan daerah yang adil dan merata, pelaksanaan otonomi yang seluas luasnya kepada setiap daerah dengan perincian yang jelas mengenai hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk menghindari sentralisasi pembagian kekuasaan. Selain itu, isi dari piagam Palembang adalah daerah menuntut adanya perimbangan keuangan antara daerah dan pusat melalui pemberian subsidi 30 persen untuk pemerintah pusat dan 70 persen untuk pemerintah

---

<sup>20</sup>Rangkuman Seminar Sehari “*PRRI Permesta dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*”. Hotel Panari Pasifik tanggal 30 Nopember 1991. Yayasan Lembaga Penelitian Sejarah (Kebudayaan) Indonesia.

<sup>21</sup>R.Z Leirissa, *PRRI Permesta, Strategi Membangun Indonesia tanpa Komunis* (Jakarta:Pustaka Utama Grafiti,1991), hal. 220

daerah serta menuntut kepada pemerintah pusat untuk membentuk legislatif yang terdiri dari Parlemen dan Senat yang berisikan wakil dari daerah daerah yang bersangkutan.

Untuk mengatasi pergolakan di daerah daerah tersebut, pemerintah pusat mengirim komisi teknis pada tanggal 18 Januari 1957 yang diketuai oleh Mr. Sumarman. Dalam penyelesaiannya, pemerintah pusat memberikan uang sebesar Rp. 350.000.000 kepada pemerintah daerah. Meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai perincian anggaran yang akan dikeluarkan, akhirnya disepakati bahwa akan diberikan dana yang ditetapkan oleh pemerintah pusat diluar anggaran belanja rutin.<sup>22</sup>

Dengan dalih Sumatera Selatan dalam keadaan darurat perang, melalui maklumat No. 001/PM/1956 Gubernur R Winarno Danuatmodjo diberhentikan dan digantikan oleh penguasa militer TT II Sriwijaya dalam rangka untuk mengamankan dan mengawasi daerah Sumatera Selatan<sup>23</sup> pengambil alihan kekuasaan sipil ke militer berdampak pula pada jabatan jabatan penting lainnya.

Dalam perkembangannya, Dewan Garuda mulai menjalin hubungan dengan orang orang sipil seperti A.K Gani dan M. Isa yang berasal dari partai Nasionalis Indonesia dan juga menjalin hubungan dengan Angkatan Darat sehingga pergerakan di Dewan Garuda mudah terbaca oleh pemerintahan pusat. Sejak saat itu, internal Dewan Garuda mengalami friksi sebagian anggotanya menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat dan sebagiannya mendukung perjuangan yang ada di Sumatera yang mana kondisi tersebut membuat kepercayaan anggota yang tergabung dalam piagam Palembang mulai mengalami penurunan kepercayaan.

Dalam pergolakan daerah di wilayah Sumatera terdapat tiga unsur yang membuat mereka tetap bersatu, yaitu partner lokal, Ideologi anti komunis dan intervensi militer. Tiga unsur tersebut terdapat dalam pembentukan Dewan Garuda di Palembang dan Dewan Banteng di Sumatera Tengah. Strategi Dewan Garuda dalam menggalang dukungan dengan merangkul partai Masyumi dan golongan sipil yang diwakili Nuh, Thalib dan Amir Husein. Sedangkan Dewan Banteng dalam menggalang dukungan nampaknya agak mudah ketimbang dengan daerah Sumatera yang lainnya karena daerah Sumatera Barat mayoritas umat Islam dan subur dengan tokoh tokoh Islam modernis seperti M Natsir yang pernah menjadi ketua umum Masyumi.

---

<sup>22</sup>Harian Indonesia Raya, terbit 29 Januari 1957

<sup>23</sup>Suara Rakyat, 11 Maret 1957

Disisi lain, pada Dewan Gajah di Sumatera tengah hanya terdapat dua unsur saja yang satu padu yaitu, unsur ideologi anti komunis dan intervensi militer. Tidak adanya unsur partner lokal dikarenakan Sumatera Utara merupakan daerah campuran dari masyarakat Aceh yang beragama Islam dan Tapanuli yang sebagian beragama Islam dan sebagian lagi beragama Islam. Selin itu, komposisi partai politik yang terdapat di Sumatera Utara mengalami keseimbangan dengan hadirnya partai Masyumi, PNI Parkindo dan PKI. Partai PNI, PKI dan Parkindo yang lebih condong kepada pemerintah pusat sudah barang tentu tidak akan memberikan dukungan kepada Dewan Gajah yang dipimpin oleh Kolonel M. Simbolon. Kehadiran suku dan adat yang berbeda beda juga membuat daerah Sumatera Utara sulit disatukan dalam satu ideologi keyakinan.

Tepat pada tanggal 15 Februari 1958, dewan mengumumkan proklamasi pemerintahan tandingan dengan apa yang mereka namakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Dewan perjuangan sejak saat itu menganggap diri mereka terlepas dari kewajiban untuk mentaati Presiden Soekarno sebagai Kepala Negara dan membentuk sebuah Kabinet PRRI.<sup>24</sup>

Kekuatan PRRI seiring dengan waktu lama-lama dapat dipatahkan oleh pemerintahan Soekarno, pada April 1961 Kawilarang menyerah dan bulan berikutnya Achmad Husein menyerah secara resmi pada tanggal 29 Mei 1961 dengan disaksikan oleh sekitar 2.500 anak buahnya, termasuk pendukung sipil dan militer.<sup>25</sup> Pada tahun kemerdekaan RI yang ke 16 presiden Soekarno memberikan Amnesti umum kepada semua orang yang terlibat PRRI dan telah menyerah menjelang 5 Oktober atau hari ulang tahun TNI 1961. Pada bulan September Sjafruddin, Burhanuddin dan Natsir menyatakan keluar dari PRRI Setelah sebelumnya PRRI berakhir dengan ditandai serangan gencar dari tentara yang dikomandoi oleh pemerintah pusat.

Dengan berakhirnya PRRI,, maka pemerintah pusat mulai mengalihkan perhatiannya kepada rekonsiliasi bangsa dengan menjari tokoh tokoh yang terlibat

---

<sup>24</sup>R.Z Leirissa, *PRRI Permesta, Strategi Membangun Indonesia tanpa Komunis*. (Jakarta:Pustaka Utama Grafiti,1991), hal. 221

<sup>25</sup>Mestika Zed, *Sumatera Barat dipangung Sejarah 1945-1995*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1998), hal. 151

dalam PRRI untuk aktif memberikan kontribusi bagi bangsa.<sup>26</sup> Namun, lagi lagi pemerintahan Soekarno mengalami ujian dalam negeri dengan merebaknya isu PKI yang menyandera dan membunuh petinggi petinggi tentara yang pada akhirnya berhasil ditumpas oleh tentara yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto.

Harapan politik Islam untuk mendapatkan ruangnya pada masa orde baru pupus sudah ketika pemerintahan Soeharto menyingkirkan kepentingan umat Islam yang dianggap pernah melanggar UUD 1945 dan melakukan penyimpangan terhadap Pancasila.<sup>27</sup> Bahkan depolitisasi Islam pada masa orde baru lebih meluas ketimbang pada masa orde lama.

Dengan alasan untuk mengantisipasi terjadinya gerakan gerakan Islam ekstrem, pemerintahan orde baru membatasi gerakan politik Islam seperti yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda yang di pengaruhi oleh pemikiran Snouck Hurgronje.<sup>28</sup> Snouck Hurgronje berpendapat Islam tidak bisa dianggap remehbaik secara politik maupun secara agama. Dalam hal ini, Snouck Hurgronje memiliki pendapat berbeda dengan sarjana sarjana lain yang menurutnya orang orang Islam sebagai orang yang baik dan patuh sehingga dia menolak secara tegas bahwa umat Islam akan mudah pindah agama secara besar-besaran bahkan dia memprediksi bahwa apabila ditekan justru akan mengalami penyebaran yang pesat seiring perkembangan *pax Nederlandica*. Lebih lanjut Snouck Hurgronje berpendapat bahwa rintangan pemerintah kolonial Belanda bukanlah Islam secara agama, tetapi yang menjadi penghambat adalah Islam sebagai doktrin politik.<sup>29</sup>

Islam sebagai doktrin politik akan menimbulkan fanatisme terhadap persatuan umat Islam dan berangkat dari sinilah para ulama Indonesia mampu membangkitkan semangat perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Oleh karenanya, belajar dari hasil penelitian Snouck Hurgronje, pemerintahan rezim orde baru mendukung sepenuhnya Islam secara agama akan tetapi memberangus Islam sebagai doktrin politik

---

<sup>26</sup>Akibat dari terlibatnya tokoh tokoh Masyumi terhadap PRRI, Presiden soekarno membubarkan Partai Masyumi tanggal 17 Agustus 1960

<sup>27</sup>Muhammad Hisyam (peny), *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal. 355

<sup>28</sup>Daniel Dhakhidae, *Cendikiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 553

<sup>29</sup>Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), hal. 41-44

sampai dengan ke akar akarnya. Sehingga, orde baru mengadopsi pemikiran tersebut dengan membatasi gerakan politik Islam.

Berbeda dengan arah dan gerakan politik sebelumnya, Islam pada masa Soekarno lebih menekankan institusi politik sedangkan di rezim orde baru Islam lebih menekankan pada visi politik. Hal ini dapat terlihat dari “mengkerutnya” institusi institusi politik terutama dengan bentuk partai politik setelah diberlakukannya penyederhanaan partai politik oleh Soeharto. Mengenai fenomena tersebut, Sudirman Tebba<sup>30</sup> mengungkapkan hasil penelitiannya dengan tiga faktor yang menyebabkan surutnya politik Islam.

Yang pertama, kuatnya campur tangan pemerintah orde baru dalam kehidupan politik atau yang biasa disebut dengan birokratisasi politik. Upaya ini dapat dilihat dari peran pemerintah yang tidak mengizinkan mantan tokoh Masyumi terpilih dalam partai Parmusi. Yang kedua, terjadinya perbedaan kelas kelas sosial seperti Abri, Golkar dan kelas birokrat yang pada gilirannya membuat perhatian masyarakat terpecah pecah tidak hanya dalam bidang politik tapi dalam bidang lainnya. Yang ketiga, pemerintah berusaha mengalihkan isu dengan mengedepan program program politik ketimbang ideologi politik. Oleh karenanya, menurut rezim orde baru, perdebatan mengenai ideologi politik dapat mengambat laju pembangunan.

Pada masa orde baru, pembinaan politik diarahkan kepada program pembangunan sehingga rakyat dapat berpartisipasi aktif dalam program pembangunan tersebut. Selain itu, pemerintah juga menerapkan konsep massa mengambang atau “*floating mass*”.<sup>31</sup> Massa mengambang menjadikan masyarakat tidak terikat secara politik dengan partai politik. Artinya, masyarakat tidak harus memilih partai tersebut meskipun kecenderungan atas keteratrikan pada partai politik tersebut kuat. Semua potensi untuk pembangunan dikerahkan, sedangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan ideologi, menurut pemerintah Soeharto harus dikesampingkan karena dapat menghambat laju percepatan pembangunan nasional.

Partai politik yang aktif pada masa orde baru diarahkan sepenuhnya untuk suksesi pembangunan. Perdebatan mengenai ideologi menjadil suatu hal yang sangat

---

<sup>30</sup>Sudirman Tebba, *Islam Orde Baru, Perubahan Politik dan Keagamaan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993), hal. 4

<sup>31</sup>Ali Moertopo, *Dasar dasar Pemikiran tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun*, (Jakarta: Yayasan Proklamasi, 1973), hal. 93-96

dilarang karena pemerintah menganggap dapat mengganggu stabilitas nasional. Sealin itu, pemerintah juga mendorong adanya keseragaman ideologi dengan adanya indoktrinasi wajib mengenai ideologi pancasila terhadap seluruh warga negara Indonesia. Indoktrinasi ini berdasarkan dengan ketetapan MPR RI tanggal 22 Maret tahun 1978 mengenai Pedoman Penghayatan dan pengamalan pancasila.<sup>32</sup>

Pemberlakuan TAP MPR RI diarahkan supaya masyarakat lebih memfokuskan kepada pengamalan pancasila ketimbang memikirkan perdebatan ideologi. Sehingga kegiatan penataran P4 ini tersebar di berbagai institusi pendidikan dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi sehingga para pemimpin Islam harus menunjukkan bahwa mereka secara politik bersikap moderat dan dapat menunjang ideologi serta politik pemerintah.

Oleh karena itu, Kuntowidjoyo melihat gerakan politik Islam pada masa orde baru terbagi ke dalam beberapa kelompok. Kelompok-kelompok tersebut masuk dan duduk dalam pemerintahan dan Golkar. Respon tersebut diambil agar kalangan Islam mengambil peran dalam pemerintahan Orde Baru. Kelompok selanjutnya adalah kelompok non kompromis yang tidak masuk dalam pemerintahan dan bersikukuh dengan pendiriannya dalam gerakan politik Islam. Mereka menolak lembaga ke-Islaman yang mapan dan arus utama politik serta sistem sosial pemerintahan.<sup>33</sup> Kelompok ini melihat tidak adanya jalan untuk kembali karena pemerintahan orde baru terlalu banyak mencampuri urusan partai politik.

Selain respon kalangan umat Islam diatas, ada juga beberapa kalangan Islam yang berusaha memodernisasi pola hubungan partai politik dan pemerintah dengan menciptakan pemikiran-pemikiran yang mendukung orde baru. Pendukung orde baru dari kalangan Islam ini memunculkan ide de-ideologisasi dan deparpolisasi. Munculnya kelompok ini menjadi tantangan tersendiri bagi kalangan Islam bagaimana memaknai modern dari sisi kaca mata Islam, bahwa politik Islam tidaklah kaku, meskipun modernisasi tersebut akan memunculkan westernisasi atau sekularisasi.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>TAP MPR RI No II tahun 1978

<sup>33</sup>M. Rusli Karim, *Dinamika Islam Indonesia, Suatu Tinjauan Sosial dan Politik*, (Yogyakarta: Hanindita, 1985), hal. 192

<sup>34</sup>Fachry Ali dan Bakhtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam, Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, (Jakarta: Mizan, 1986), hal. 107-108

Menurut Deliar Noer dalam bukunya “Umat Islam dan Masalah Modernisasi” menyebutkan bahwa modernisasi bukanlah masalah dalam Islam selama modernisasi tersebut tidak menimbulkan permasalahan teologi dalam Islam. Justru, menurut modernisasi sejalan dengan Islam. Untuk mencapai modernisasi, umat Islam harus menghilangkan persoalan dikalangan intern umat Islam itu sendiri seperti taqlid terhadap pemikiran klasik tanpa mempertimbangkan persoalan kekinian dan keterikatan terhadap kehidupan sufisme yang berlebihan. Oleh karena itu, Deliar Noer melihat persoalan tradisionalisme yang selama ini dianggap sebagai hal yang baku dan tidak dapat di modernisasi harus dikesampingkan terlebih dahulu.

Mengenai modernisasi yang dilakukan oleh rezim orde baru Deliar Noer berpendapat bahwa sebaiknya umat Islam memandang modernisasi yang dilakukan pemerintahan sesuatu yang positif demi kebaikan bersama. Namun, pembangunan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi pembangunan kehidupan yang demokratis dan berkeadilan juga harus diutamakan. Dalam melihat partisipasi pembangunan di tanah air, para intelektual Islam memandang bahwa umat Islam Indonesia memiliki hak yang sama untuk ikut menyumbangkan pikiran pikiran mereka dalam setiap proses pembangunan di Indonesia.

Selain dari Deliar Noer, Nurcholis Madjid juga memberikan pendapatnya mengenai modernisasi di zaman orde baru. Nurcholis Madjid dalam bukunya “Islam Yes, Partai Islam No” menyebutkan meskipun secara kuantitas tahun ke tahun populasi umat Islam Indonesia mengalami penambahan, namun tidak diiringi dengan ketertarikan kepada partai partai Islam atau organisasi organisasi kemasyarakatan Islam. Islam sebagai sebuah diktum yang tetap, maka ia bersifat eternal dan essensial, tapi ketika Islam menjadi sebagai produk penafsiran sejarah dan budaya, maka ia akan mengalami *desakralisasi*.

Menurutnya, ide tentang partai Islam sudah tentu tidak akan menarik, karena partai partai Islam gagal membangun citra positif bahkan terkesan mengalami kehilangan dinamika dan stagnasi serta yang lebih parahnya adalah keterlibatan partai partai Islam dalam praktik korupsi di Indonesia. Jika modernisasi adalah westernisasi, yang didalamnya terdapat unsur unsur sekulerisasi dan peradaban barat, maka secara tegas Nurcholis Madjid menolak ide dan gagasan modernisasi.

Oleh karenanya, dalam menyikapi kebijakan modernisasi yang dilakukan oleh pemerintahan orde baru, kalangan umat Islam berbeda pendapat dan sebetulnya lebih terkesan kepada kehati hatian agar modernisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Soeharto sejalan dan senafas dengan arah pembangunan dan kepentingan bangsa Indonesia.

Meskipun pada pemilu 1971 partai partai Islam mendapatkan tekanan berat, namun para tokoh Islam mampu memainkan peran sehingga sebagian masuk dan berperan dan pemerintahan Soeharto. Salah satu strategi pemerintahan Orba untuk melemahkan kekuatan politik Islam adalah dengan membentuk partai Golkar yang di back up oleh kalangan militer. Sehingga kombinasi militer sipil dari Golkar ini mampu memenangi seluruh pemilu yang diselenggarakan pada masa orde baru.

Usaha-usaha pemerintah Orde Baru untuk memenangkan Golkar dalam Pemilu 1971 antara lain dengan mengharuskan semua pegawai negeri sipil untuk memilih Golkar, kebijaksanaannya umumnya ditentukan oleh militer dan pemerintah. semua pegawai negeri sipil tanpa kecuali diharuskan menjadi anggota Sekber Golkar.<sup>35</sup> Usaha lainnya adalah melalui militer dengan menggunakan langkah-langkah *koersif* dan *kooptatif* untuk mempengaruhi hasil pemilihan umum.<sup>36</sup>

## **PENUTUP**

Salah satu sumber kekuatan Islam Indonesia, khususnya di Palembang adalah terletak pada kekuatan ulamanya yang konsisten terhadap ajaran Islam dan pengusiran terhadap penjajahan Belanda. Maka dengan berkurangnya ulama ditanah air, dapat mengakibatkan kurangnya persatuan antar masyarakat dan bangsa Indonesia.

Fakta bahwa di Sumatera Selatan pernah berdiri gerakan Dewan Garuda merupakan salah satu bentuk ketidakpuasan Palembang terhadap pemerintahan pusat yang hanya membangun di Jakarta (*Jakarta Sentris*). Pembangunan di Indonesia dalam pandangan masyarakat Sumatera Selatan tidak diimbangi dengan produksi daerah tersebut. Berbanding terbalik dengan penghasilan Palembang yang melimpah ruah, sawit

---

<sup>35</sup> Albert Widjaja, *Budaya Politik Dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: LP3ES, 1982), hal. 96

<sup>36</sup> Al-Chaidar, *Reformasi Prematur Jawaban Islam terhadap Reformasi Total* (Jakarta: Darul falah, Cet. ke-4, 1999), hal. 23

karet, gas dan sumber daya alam lainnya, pembangunan di Palembang dianggap lambat dan pemasukan dari perusahaan besar hanya berhenti pada pemerintah pusat saja.

Dibawah komando militer dan Golkar pada masa pemerintahan orde baru, Soeharto berusaha menstabilkan ekonomi dan politik melalui slogan pembangunannya. Namun, kemajuan tersebut tidak diimbangi dengan peraturan yang dapat menjadikan masyarakat bebas untuk berpolitik. pesatnya pertumbuhan ekonomi pada zaman orde baru telah menimbulkan keresahan dihati masyarakat dengan tingginya angka ketimpangan sosial, ketidakadilan, ketiadaan jaminan keamanan nasional dan berbagai akses lainnya.

Pada gilirannya, keadaan tersebut telah menjadikan Banyak kaum politik Islam modernis Palembang yang mengalihkan ke perhatiannya kepada hal hal yang sifatnya pengajaran dan pengabdian keIslaman di majelis majelis ilmu. Pada pemilu 1971, hasil pemilu di Sumatera Selatan menunjukkan grafik suara yang sangat mengejutkan dimana Golkar mulai mendominasi pemilu di daerah Sumatera Selatan, disusul oleh tiga partai besar yaitu, NU, Parmusi dan PNI. Suara suara orang Sumatera Selatan yang biasanya mengalir pada partai partai Islam, pada pemilu 1971 mulai terdistribusi ke pos pos yang lain terutama Partai Golkar yang berhasil meraih suara dominan di Sumatera Selatan.

Kenyataan tersebut membuat tokoh-tokoh Islam Palembang yang semula terlibat dalam partai politik Islam sebagian mereka banyak yang pindah kendaraan politiknya dan mulai mengambil peran dalam kepengurusan partai Golkar. Keterlibatan ini merupakan jalan tengah untuk menjembatani kepentingan umat Islam di satu sisi dan mengikuti arus politik pemerintah pusat di sisi lain. Pada masa Orde Baru, umat Islam baik dari kalangan tradisionalis terutama dari kalangan modernis masih tetap berkeinginan untuk melestarikan pemikiran pemikiran formalisme pendidikan. Disamping karena keinginan kalangan elit muslim untuk bernostalgia semasa kejayaan politik Islam pada masa Orde Lama, juga karena masih tetap berkembangnya pola dasar pandangan miring antara sesuatu yang dianggap sebagai masukan Islam dan masukan non Islam (Barat) ketika mereka saling berhadapan dengan tantangan modernisasi. Dalam pencarian posisi

menurut konstelasi baru dan masih dalam lingkungan teoritis dan intelektual, belum memberikan jawaban tegas dan pasti tentang persepsi ke-Islaman terhadap modernisasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. *Islam dan Masyarakat : Pantulan Sejarah Indonesia*. Jakarta LP3ES, 1987.
- Al-Chaidar, *Reformasi Prematur Jawaban Islam terhadap Reformasi Total*, Jakarta:Darul falah, Cet. ke-4, 1999.
- Alfian, *Hasil Pemilihan Umum 1955 Untuk DPR*, Jakarta : Leknas, 1971.
- Ali, Fachry dan Bahtiar Effendy. *Merambah Jalan Baru Islam : Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*. Bandung : Penerbit Mizan, 1992.
- Alishjhabana, Takdir, *Perjuangan Untuk Autonomi dan Kedudukan Adat Didalamnja* Jakarta: Pustaka Rakyat, 1957.
- Amin, Ali, *Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam*, “Masuk dan berkembangnya Islam di Sumatera Selatan, Jakarta:UI Press 1986.
- Anwar, M. Syafi'i, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, Jakarta, Paramadina, 1995.
- Benda, Harry J., *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.
- Boedenani dan Djavid, *Tambo Kerajaan Sriwijaya sampai berakhirnya Kesultanan Palembang*, Bandung: Penerbit Terate, 1956.
- Britton, Peter, *Professionalisme dan Ideologi Militer Indonesia Perspektif Tradisi Tradisi Jawa dan Barat*, Jakarta: LP3ES, 1996.
- Bruinessen, Martin Van. *NU : Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta : LkiS, 1994.
- Dahlan, H.A., *Risalah Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II*, Palembang: TP, 1981.
- Boedenani dan Djavid, *Tambo Kerajaan Sriwijaya sampai berakhirnya Kesultanan Palembang*, (Bandung: Penerbit Terate, 1956)
- Dhakhidae, Daniel, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina 1998
- Fealy, Greg. *Ijtihad Politik Ulama : Sejarah NU 1952-1967*. Jakarta : LkiS, 1998.
- Gie, The Liang, *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia*, jilid 2, (Jakarta : 1965

- Haris, Syamsuddin, *PPP dan Politik Orde Baru*, Jakarta : LP3ES, 1991.
- Hasan, Sahar L, *Memilih Partai Islam: Visi, Misi dan Persepsi.*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Hisyam, Muhammad (peny), *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Imawan, Riswandha, *Membedah Politik Orde Baru*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997.
- Kahin, Audrey R. dan George McT. Kahin. *Subversi Sebagai Politik Luar Negeri : Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1997.
- Leirissa, R.Z., *PRRI Permesta, Strategi Membangun Indonesia tanpa Komunis*, Jakarta:Pustaka Utama Grafiti,1991.
- Moertopo, Ali, *Dasar dasar Pemikiran tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun*, Jakarta: Yayasan Proklamasi, 1973.
- Noorduyn, J., *Islamisasi Makassar*, Bhratara : Jakarta,1972.
- Rahim, Husni, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam*, Jakarta:Logos,1998.
- Santun, Dedi Irwanto Muhammad, *Venesia dari Timur: Memaknai Produksi dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang dari Kolonial sampai Pascakolonial* Yogyakarta:Ombak, 2011.
- Tebba, Sudirman, *Islam Orde Baru, Perubahan Politik dan Keagamaan*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993.
- Widjaja, Albert, *Budaya Politik Dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Zed, Mestika, *Sumatera Barat dipangung Sejarah 1945-1995*, Jakarta: Sinar Harapan, 1998.
- Zulkifli, *Ulama Sumatera Selatan: Pemikiran dan Peranannya dalam Lintasan Sejarah*, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 1999.
- TAP MPR RI No II tahun 1978
- Harian Indonesia Raya, terbit 29 Januari 1957
- Suara Rakyat, 11 Maret 1957.